

**PENGUATAN KERJASAMA KONTRA TERORISME
INDONESIA-AMERIKA SERIKAT
PADA TAHUN 2014-2018**

Oleh: Samsuri Sirait

[\(samsurisirait007@gmail.com\)](mailto:samsurisirait007@gmail.com)

Pembimbing: Dr. H. Mhd Saeri, M.Hum

Bibliografi 11 Jurnal, 24 Buku, 9 Skripsi, dan 20 Website

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H. R. Soebrantas KM. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru
28293

Telp/Fax: 0761-63277

Abstract

This research discuss about Indonesia's interests in strengthening counter terrorism cooperation relations with the United States of America in effort to overcome the terrorism threat in Indonesia. Terrorism is the enemy of all nations and transnational in nature thus there is a need for various cooperation to eradicate it. The terrorism activity that have appeared both internationally and nationally throughout 2014 – 2018 have given quite a significant effect to Indonesia's security stability. One of the nation that Indonesia have asked to cooperate in counter terrorism is the United States of America. Previous counter terrorism cooperation have convinced both nation to further strengthen this relation.

The perspective used in this research is the Realism perspective based on the view that international cooperation is regarded as important if it's goal is supporting the nation to achieve it's interest. The theory used is the security theory. The focus of this research is to study Indonesia's interest within the discourse of international terrorism. The data of this research is taken from books, journal articles, government documents, and websites.

Indonesia in conducting counter terrorism cooperation strengthening with the United States of America to increase Indonesia's security capability in overcoming terrorism. This was later proven by the increase in military assistance, training, and funding by the United State to Indonesia.

Keywords: *cooperation strengthening, counter terrorism, military, security*

PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas mengenai kepentingan Indonesia pada penguatan hubungan kerjasama kontra terorisme dengan Amerika Serikat (AS) dalam upaya menanggulangi ancaman terorisme di Indonesia.

Secara historis, hubungan kerjasama kontra terorisme antara Indonesia dan AS sudah terjalin sejak tahun 1952 antara Presiden Soekarno dan Presiden Harry Truman dalam program MSA (*Mutual Security Act*). MSA adalah gabungan program US AID (*Act International Development*) dan DSA (*Defence Sistance Act*), yang mana merupakan bantuan militer ekonomi dan teknis yang bertujuan membantu pembangunan negara miskin, menahan pengaruh ideologi komunisme dan terorisme.¹ Akan tetapi kedua belah pihak belum terlalu memfokuskan kepada isu-isu terorisme dikarenakan, terorisme masih dianggap sebagai bentuk gerakan sparatis.

Hubungan kerjasama kontra terorisme kedua negara kemudian mulai ditata kembali pasca serangan gedung *World Trade Centre* (WTC) pada 11 September 2001 (9/11). Serangan ini menjadi pemicu AS untuk mendeklarasikan perang global melawan terorisme atau *Global War on Terror* diiringi dengan serangan balasanya terhadap kelompok Fundamentalis Islam di Afghanistan yaitu Al Qaeda sebagai dalang serangan WTC tersebut.

Munculnya doktrin *war on terrorism* dari AS, tentunya berdampak bagi Indonesia, sebagai negara yang

berpenduduk beragama Islam terbesar di dunia bahkan tidak sedikit gerakan-gerakan untuk menolak doktrin tersebut karena dianggap memerangi umat muslim di seluruh dunia.

Proses internalisasi wacana *War on Terror* di Indonesia dimulai saat kunjungan Presiden Megawati Soekarno Putri ke Amerika Serikat pada tanggal 19 September 2001. Pada kunjungan tersebut Presiden AS George W. Bush mengajak untuk masuk dalam program *war on terrorism* dengan menawarkan bantuan dalam jumlah yang besar terhadap Indonesia melalui Megawati. Setidaknya Presiden George W. Bush menawarkan bantuan dana dengan total US\$657.400.000 dalam bentuk keuangan, yang terdiri dari \$400.000 untuk mendidik warga sipil Indonesia di bidang pertahanan, \$10 juta untuk pelatihan polisi; \$130 juta untuk membantu membiayai reformasi hukum dan peradilan; \$10 juta untuk membantu pengungsi di Maluku; \$5 juta untuk membangun kembali sekolah yang gancur dan infrastruktur lainnya di aceh; \$2 juta untuk membantu orang Timor Timur yang telah memilih untuk tinggal di Indonesia; \$400 juta untuk meningkatkan perdagangan dan investasi, khususnya di sektor minyak dan gas; serta status bebas bea senilai \$100 juta untuk beberapa produk Indonesia.² Mengingat ketidaksetabilan yang sedang terjadi di Indonesia Megawati menanggapi dengan memberikan janji untuk mendukung dalam *War on Terror* dan menjanjikan untuk memperkuat kerja sama Indonesia Amerika dalam *War on Terror*.³

² Sania Febrica, "Securitizing Terrorism in South Asia: Accounting for the Varying Responses of Singapura and Indonesia". (University of California, 2010), hal 573.

³ William Wise, *Indonesia's War on Terror*, (Washington, DC United States-Indonesia Society, 2005) hal 26. Diakses dari <https://jko.jten.mil/courses/at1/courseFiles/reso>

¹ "Mutual Security Act Penyebab Jatuhnya Kabinet Sukiman," *Teman Sejarah*,. Diakses dari <https://www.hariansejarah.id/2019/08/mutual-security-act-penyebab-jatuhnya.html?m=1>.

Proses internalisasi *War on Terror* di Indonesia mendapat momentum saat terjadi peristiwa bom Bali I, 12 Oktober 2002. Pada 12 Oktober 2002, pukul 11:05 sebuah bom elektronik meledak Paddy Bar, sebuah cafe malam di Kuta Bali. Karena bom itu para pelanggan berlari ketakutan keluar dari tempat itu. Di luar cafe terjadi ledakan kedua dari bom yang ada dalam sebuah Mitsubishi minivan putih yang ada di depan Sari Club disebelah jalan. Bom ketiga meledak di dekat Konsulat AS. Peristiwa ini menimbulkan korban lebih dari 200 meninggal dan 300 lainnya luka-luka. Korban sebagian besarnya adalah warga Australia, selain itu ada juga warga asing lain dan warga Indonesia.⁴

Indonesia dalam menghadapi terorisme pasca Bom Bali tersebut langsung bergerak cepat dengan membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 berisi tentang langkah-langkah strategis oleh pemerintah Indonesia untuk memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan komitmen pemerintah untuk tetap menjunjung tinggi hukum dan hak-hak asasi manusia dan tidak diskriminatif.⁵

Pemerintah Indonesia dalam Perpu tersebut, dengan tegas akan menindak tersangka terorisme dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun. Perpu tersebut juga menyatakan pemerintah Indonesia menggaris bawahi kerja sama internasional dalam rangka pencegahan

[urces/Antiterrorism Electronic Library/Indonesia's War on Terror.pdf](#)

⁴ Ibid, hal 11

⁵Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53104/perpu-no-1-tahun-2002>

dan pemberantasan tindak pidana terorisme. Kerja sama yang dimaksudkan dapat berupa kerja sama di bidang intelijen, kepolisian, dan kerjasama teknis lainnya.

Kerjasama kontra terorisme antara Indonesia dan AS pertama kali dibentuk kedalam kesepakatan bersama pada *Memorandum Of Understanding On Combating International Terrorism* (MoUCTI) yang disahkan pada tahun 2002. MoU ini merupakan perjanjian kerjasama pertama dalam kontra terorisme pasca peristiwa 9/11 sekaligus berisikan pengaturan tentang pembentukan forum dialog bersama *Indonesia-United States Security Dialogue* (IUSSD), pertukaran data intelijen, penegakan hukum, pelatihan dan kunjungan Kepolisian ke AS, serta pembentukan kelembagaan.⁶

Salah satu implementasi MoU tersebut adalah bentuk bantuan kontra terorisme di Indonesia menjadi dua bagian yaitu melalui Kepolisian dan TNI. Program untuk kepolisian disebut sebagai ATA (*Anti Terrorism Act*) dengan Program *Bereu of Diplomatic Security* dan CTFP (*Combating Terrorism Fellowship Program*) melalui DoD (*Department Defense*) untuk TNI.⁷

Program ATA bertujuan untuk memberikan bantuan kepada negara-negara mitra dengan memberikan pelatihan kontra terorisme dan

⁶ Fuqohanim, "BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan," (Skripsi Hubungan Internasional, Universitas Komputer Indonesia), hal 134. Diakses dari <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/455/jbptuni-kompp-gdl-fuqohanim4-22706-8-k-bab-v.pdf>.

⁷ Cesarani Rilistya, "Implementasi Kerjasama Indonesia Dengan As Dalam Penanganan Aksi Terorisme Di Indonesia," *Journal Hubungan Internasional*, Vol.2, No.1, (Tahun 2016): hal.166-173. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/135069-ID-implementasi-kerjasama-indonesia-dengan.pdf>

peralatan, meningkatkan hubungan bilateral, dan meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Khusus untuk Indonesia jika masuk kedalam program tersebut akan mendapatkan bantuan ekonomi, keuangan dan pelatihan polisi, yang mana masing masing bantuan akan diberikan 130 juta dolar dan 10 juta dolar Amerika.⁸

Indonesia kemudian membentuk institusi domestik yaitu *Counter Terrorism Coordinating Desk* (CTCD) atau Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) dan Densus 88. Institusi ini didirikan guna untuk merumuskan kebijakan dan strategi nasional untuk memerangi terorisme dan mengkoordinasi tahap operasional yang harus dilakukan. DKPT didirikan pada tanggal 22 Oktober 2002 berdasarkan Inpres No. 4 Tahun 2002, dan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik Keamanan No.Kep-26/Menko/Polkam/11/2002.⁹ DKPT ini juga merupakan cikal bakal kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010. Densus 88 sendiri dibentuk melalui Surat Keputusan Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni, untuk menerapkan Undang-Undang No.15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.¹⁰

Pasca kesepakatan kerjasama kontra terorisme antara kedua negara terjalin, membawa perubahan yang cukup signifikan dalam penanganan terorisme di Indonesia. Dimana aktivitas terorisme di Indonesia dapat di tanggulangi dengan pendekteksian dini, penangkapan, pengejaran, dan penyerangan kepada kelompok-kelompok terorisme di Indonesia oleh kelembagaan terkait, walaupun belum terlalu maksimal.

Kerangka Teori

a. Perspektif Realisme

Perspektif yang penulis pakai dalam kajian ini adalah Realisme. Perspektif ini menganggap bahwa negara sebagai aktor utama dalam pola hubungan internasional. Dimana hanya negara yang bisa menentukan kondisi hubungan internasional, terutama bagi negara yang memiliki kekuatan yang besar. Selain itu perilaku dari negara diyakini selalu memiliki relasi dengan kepentingan yang bersifat material.

Kerjasama internasional menurut realisme penting dilakukan hanya ketika kerjasama tersebut menguntungkan bagi negara-negara yang terlibat. Mereka percaya bahwa negara-negara yang terlibat dalam institusi-institusi internasional dan melakukan atau terlibat pada kesepakatan-kesepakatan kerja sama ketika hal terbut memiliki keuntungan dan kepentingan bagi negara tersebut. Sehingga kesepakatan tersebut bisa dilanggar atau diubah sewaktu-waktu apabila bertentangan

⁸ Ambrosius Yustinus Kedang, "Internasionalisasi dan Internalisasi Wacana War on Terror," *Journal Sospol*, Vol.3, No 2 (Juli-Desember 2017), Hal 21-42. Diakses dari <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/download/4883/4972/12574>

⁹ Ganewati Wuryandari, "Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Menghadapi Isu Terorisme Internasional," *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.11 No. 2 (Desember 2014): hal 71-83. Diakses dari <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/202/86>

¹⁰ Dewa Agung, "Detasemen Khusus 88 Anti Teror," *eduNitas*, diakses dari http://kk.sttbandung.ac.id/id3/2-3042-2940/Detasemen-Khusus-88_40996_kk-sttbandung.html

dengan kepentingan nasional.¹¹ Hal yang paling penting bagi realisme adalah kerja sama internasional dianggap penting apabila tujuannya mengarahkan kepada negara untuk mengejar dan mendapatkan kepentingan mereka.

Ketika berbicara tentang kontra terorisme yang berkembang di dunia internasional, kaum pemikir realisme menempatkan gagasan tentang gerakan internasional *war on terror* sebagai suatu instrumen untuk mencapai kepentingan dari aktor-aktor hubungan internasional. Ketika ada negara seperti Amerika Serikat yang berusaha keras untuk mempopulerkan gagasan perang melawan terorisme sebagai suatu gerakan moral untuk melindungi keselamatan (HAM) masyarakat sipil, sejatinya dalam pandangan realisme, tindakan Amerika tersebut lebih dapat dipahami sebagai bentuk upaya pencapaian kepentingan, dalam hal ini kepentingan nasional dalam konteks keamanan. Begitu pula dalam memahami negara-negara yang memutuskan untuk bergabung dalam *war on terror*, yang dilandasi dengan kepentingan nasional negara masing-masing. Negara-negara yang memutuskan untuk bergabung dalam wacana *war on terror* sejatinya telah menggunakan pilihan rasional sebagai formulasi pembuatan kebijakan untuk menghadapi isu terorisme dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dari masing-masing negara tersebut, seperti kepentingan di bidang keamanan maupun ekonomi.¹²

¹¹ Opcit. Hal 59

¹² Ardli Johan Kusuma dkk, "Analisis Perkembangan Norma Internasional "War on Terror" dalam Perspektif Realis, Liberalis dan Konstruktivis," *Indonesian Perspective*, Vol. 4, No. 1 (Januari-Juni 2019): 1-19. Diakses dari

Misalnya saja Indonesia yang bergabung dalam wacana *war on terror* yang dilandasi dengan beberapa kepentingan seperti: kepentingan ekonomi (keluar dari krisis yang terjadi sejak 1997) yaitu, ketika Indonesia bergabung dalam wacana *war on terror*, maka Indonesia akan mendapatkan bantuan keuangan dari Amerika Serikat. Selain itu bergabungnya Indonesia dalam wacana *war on terror* juga dilandasi kepentingan untuk menghindari sanksi dari PBB dan dunia Internasional, karena Indonesia telah meratifikasi instrument hukum internasional anti terorisme, sehingga Indonesia wajib mengikuti wacana global *war on terror*.¹³

b. Tingkat Analisa Negara Bangsa (Nation State Analisis)

Pada *nation state analysis*, negara merupakan aktor dominan dan yang paling kuat dalam interaksi di pentas dunia. Negara sebagai aktor relatif bebas dalam menentukan kebijakan apa yang harus diambil. Walaupun setiap negara harus berhubungan dengan realitas sistem dunia, akan tetapi pada hakikatnya adalah aktor yang mengendalikan sistem internasional, termasuk negara kecil dan paling lemah

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/download/24477/15520>

¹³ Kusuma, "The Allegation of Human Rights Violation in the Pro-Cess of Counter-Terrorism Acts in Indonesia by Densus 88 Force. Advanced Science Letters Dikutip Dari Ardli Johan Dkk 'Analisis Perkembangan Norma Internasional: War On Terror' Dalam Perspektif Realis, ," *Indonesian Perspective* Vol.4, No. (n.d.), diakses dari <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dM4XYUvRr3YJ:https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/download/24477/15520+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

sekalipun.¹⁴ Oleh karena itu, tingkat analisa ini menganggap bahwa penekanan variable atau perbedaan antar pelaku pembuat kebijakan satu negara dengan negara lain adalah hal yang sia-sia, dan seharusnya lebih menekankan pada perilaku negara bangsa karena perilaku negara bangsalah yang pada dasarnya mendominasi hubungan internasional.

Lain sisi, penguatan kerjasama kontra terorisme antara Indonesia AS menekankan pada tingkat analisa ini dimana, asumsi pengambilan keputusan dimanapun berada pada dasarnya akan berperilaku sama apabila menghadapi situasi dan kondisi yang sama.

c. Teori Kerjasama Keamanan (Security Cooperation)

Pada dasarnya kerjasama keamanan (*security cooperation*) adalah kesepakatan negara-negara untuk bekerjasama demi menjaga keamanan dan memastikan kepentingan nasional mereka tercapai. Kerjasama keamanan dapat diartikan sebagai ladaan hubungan yang secara spesifik sangat bergantung kepada faktor-faktor tertentu yang kemudian negara terlibat dalam kerja sama ini satu sama lain harus memiliki tradisi kerja sama dan aturan baik verbal maupun non verbal yang akan mengatur cara mereka berinteraksi.¹⁵

Kerjasama keamanan biasanya dapat dipahami sebagai kolaborasi diantara negara-negara yang bersengketa, kemudian kerjasama keamanan dilakukan untuk menangkis ancaman.

¹⁴ Jhon T. Rourke, *International Politics on The World Stage* (USA: University of Connecticut, 2011).

¹⁵ Achmad Yuzardhi, "Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Kerja Sama Kontra-Terrorisme Indonesia-Rusia Tahun 2016," *Moestopo Journal International Relations*, Volume 1, No. 1, (Maret 2021), hlm 18

Kerjasama keamanan mengisyaratkan untuk mengendalikan tujuan penting, keberlangsungan hidup bangsa, pada sumber daya, niat dan kegiatan negara-negara lain yang sulit untuk didamaikan dengan alasan keamanan yang dijamin menolong kepentingan keamanan negaranya untuk mengatasi konflik. Negara-negara yang memilih kerjasama keamanan mengorbankan aset keamanan mereka untuk mendapatkan keamanan yang lebih tinggi dengan memperoleh aset lain yang mereka percaya dapat membantu mereka untuk menyediakan keamanan mereka dengan lebih baik.

Kerjasama keamanan sendiri digunakan untuk mengatasi bahaya keamanan atas kelompok terorisme yang ada di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Kerjasama keamanan yang dilakukan dapat dikatakan menguntungkan Indonesia dimana banyak bantuan yang diberikan oleh AS. Karena dengan adanya penguatan kerjasama kontra terorisme tersebut maka diharapkan kasus-kasus terorisme yang selama ini di Indonesia dapat diatasi secara maksimal.

d. Konsep Kepentingan Nasional

Morgenthau menyatakan bahwa kepentingan nasional dapat didefinisikan oleh *power*, dimana hal tersebut dapat memberikan sebuah gambaran atau acuan yang rasional bagi para pembuat kebijakan. Kebijakan yang nantinya diterapkan akan mempengaruhi politik internasional yang dipandang sebagai *struggle for power* atau perjuangan untuk kekuasaan antar negara.¹⁶

¹⁶ Nabila, "Bab I: 1.5.1 Defensif Realisme" (Skripsi Hubungan Internasional, Universitas Diponegoro, 2018), hal 7, diakses dari http://eprints.undip.ac.id/70320/2/2. BAB_I.pdf

Dalam mengukur intensitas kepentingan nasional suatu negara dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

- a. *Survival*, ketika keberadaan sebuah negara berada dalam bahaya akibat dari serangan militer yang terbuka terhadap wilayahnya sendiri. Intensitas ini terjadi ketika negara berada dalam bahaya dan mengancam keberlangsungan hidup rakyat.
- b. *Vital*, suatu negara mengeluarkan sebuah Kebijakan karena adanya ancaman ekonomi terhadap negaranya. Negara menganggap hal tersebut dapat mengancam keberlangsungan hidup.
- c. *Major*, secara politik, ekonomi, ideologi, negara terpengaruh oleh lingkungan internasional, dan karenanya negara perlu mengambil tindakan kolektif.
- d. *Peripheral*, kesejahteraan negara dipengaruhi oleh kepentingan pribadi warga negara dan perusahaan yang beroperasi.

Berdasarkan penjabaran mengenai kepentingan nasional, konsep ini selaras dalam menganalisa penelitian ini, dalam upaya mempertahankan kepentingan nasionalnya, Indonesia melakukan penguatan kerjasama kontra terorisme dengan Amerika Serikat. Kepentingan Indonesia untuk menjaga keamanan nasionalnya dari ancaman teroris, dan juga meningkatkan kapabilitas pengamanan yang dimilikinya dengan cara kerjasama.

PEMBAHASAN

Sejarah Hubungan Kerjasama Kontra Terorisme Indonesia-Amerika Serikat

Secara historis, hubungan kerjasama kontra terorisme antara Indonesia dan AS terbentuk karena terjadinya hubungan diplomatik pada

tahun 27 Desember 1949 dengan ditandai peresmian kantor Kedubes AS di Jakarta, serta menunjuk Florance Merle Chocahran sebagai Duta Besar pertama AS untuk Indonesia. Indonesia sendiri baru menempatkan Duta besarnya pada 20 Febuari 1950 dan menunjuk Ali Sostro Amidjojo sebagai perwakilannya.¹⁷

Kerjasama kontra terorisme antara Indonesia dan AS pertama kali terbentuk dalam program MSA (*Mutual Security Act*). Program MSA disepakati pada tahun 1952 yaitu pada periode Presiden Soekarno (orde lama) dan Presiden Harry Trumen. AS yang diwakili Florance Merle Chocahran. MSA adalah gabungan program US AID (*Act International Development*) dan DSA (*Defance Sistance Act*), yang mana merupakan bantuan militer ekonomi dan teknis yang bertujuan membantu pembangunan negara miskin, menahan pengaruh ideologi komunisme dan terorisme.¹⁸

Kerjasama kontra terorisme yang sudah terjalin sejak era Soekarno tidak terlalu memberikan dampak signifikan dalam penanganan terorisme. Hal ini dikarenakan terorisme pada masa-masa tersebut dianggap sebagai sebuah bentuk gerakan sparatis dalam mengganggu kedaulatan NKRI.

Kerjasama keduanyapun kemudian kembali ditinjau ulang pasca Peristiwa 11 September 2001 atau dikenal dengan 9/11. Kerjasama kontra terorisme Indonesia dengan AS pasca

¹⁷ KEMENLU, "Kerjasama Bilateral Amerika Serikat-Indonesia" *Kemenlu.go.id*, diakses dari www.kemlu.go.id/pages/IFPDisplay.aspx?Name=BilateralCooperation&IDP=37&P=Bilateral&I=id.

¹⁸ "Mutual Security Act Penyebab Jatuhnya Kabinet Sukiman," *Teman Sejarah*, diakses dari <https://www.hariansejarah.id/2019/08/mutual-security-act-penyebab-jatuhnya.html?m=1>.

11 September 2001 pertama kali terjalin saat Presiden Indonesia Megawati Soekarno Putri melakukan kunjungan ke AS pada 19 September 2001. Presiden Megawati merupakan salah satu kepala negara pertama yang mengunjungi AS pasca 9/11.

Pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Goerge W Bush menghasilkan kesepakatan akan diadakan Dialog Keamanan setiap tahunnya yang membicarakan berbagai macam isu keamanan dan pertahanan baik keamanan nasional maupun keamanan regional, serta pemberantasan terorisme.¹⁹

Pernyataan ini juga sekaligus penandatanganan kedua negara dalam Kesepakatan *Memorandum Of Understanding On Combating International Terrorism (MoUCTI)*, yang mana pokok utama dari kesepakatan tersebut adalah pertukaran data intelijen, penegakan hukum, pelatihan dan kunjungan Kepolisian ke AS serta pembentukan kelembagaan.²⁰ Implementasi kerjasama dalam menangani aksi terorisme di terapkan menjadi dua bagian yaitu *Anti Terrorism Act (ATA)* melalui *Program Bereu of Diplomatic Security* untuk Kepolisian dan Kerjasama Pertahanan melalui *Combating Terrorism Fellowship Program (CTFP)* melalui *Departement Defense (DoD)* untuk TNI.²¹

¹⁹ ibid

²⁰ Fuqohanim, “*BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan,*” (Skripsi Hubungan Internasional, Universitas Komputer Indonesia), hal 134. Diakses dari https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/455/jbptuni_kompp-gdl-fuqohanim4-22706-8-k-bab-v.pdf.

²¹ Cesarani Rilistya, “Implementasi Kerjasama Indonesia Dengan AS Dalam Penanganan Aksi Terorisme di Indonesia,” *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol. 2, No. 1 (Tahun 2016) 166-

Program ATA bertujuan untuk memberikan bantuan kepada negara-negara mitra dengan memberikan pelatihan kontra terorisme dan peralatan, meningkatkan hubungan bilateral, dan meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Khusus untuk Indonesia, Bush menawarkan bantuan ekonomi pada Indonesia berupa dana sebesar 130 juta dolar Amerika untuk keuangan pada tahun 2002 dan bantuan 10 juta dolar untuk pelatihan Polisi Indonesia.²²

Densus 88 memiliki peran yang besar pada kontra terorisme di Indonesia. Kemampuan Densus 88 ini berasal dari potensi polisi Indonesia yang secara khusus dilatih oleh FBI. AS mendanai pelatihan-pelatihan untuk pasukan khusus ini melalui program ATA. Dibentuk setelah bom Bali I, tidak lama setelah pembentukannya, Densus 88 mulai bekerja dan membuktikan kemampuannya dalam kontra terorisme. Paska bom Bali merupakan tahun-tahun tersibuk bagi Densus 88 yang baru dibentuk pada bulan April 2003. Kemampuan Densus 88 sudah terlihat hanya dua bulan setelah pembentukannya, menghadapi tugas pertama yaitu menyelidiki peledakan bom di Hotel JW Marriott, 5 Agustus 2003. Pada peristiwa itu, hanya dalam beberapa minggu Densus 88 mampu menangkap jaringan pengebom. Pada peledakan bom selanjutnya yaitu bom Kuningan, Densus 88 mampu membongkar kasus tersebut dan segera menangkap para pelaku. Tiga tahun setelah bom Bali 2002 kembali terjadi

173, diakses dari <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>

²² Ambrosius Yustinus Kedang, “Internasionalisasi dan Internalisasi Wacana War on Terror,” *Journal Sospol*, Vol.3, No 2 (Juli-Desember 2017), Hal 21-42. Diakses dari <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/download/4883/4972/12574>

peledakan bom Bali pada 1 Oktober 2005, walaupun korban tak sebanyak bom Bali I. Densus 88 mampu menyelesaikan kasus tersebut dalam tiga bulan.²³

Ditemukan sejumlah amunisi dan senjata di bunker di rumah seorang petani bernama Sikas, jenis amunisi dan senjata yang ditemukan itu adalah 2.009 butir peluru untuk senapan serbu jenis AK, 20 kg Tri Nitro Toluena (TNT), potassium chlorate 30 karung dan 2 jerigen dengan berat total 625 kg, detonator aktif 200 buah, 1 senjata laras panjang rakitan, 1 revolver rakitan, sebuah senjata api AR organik, magazine untuk senjata M16 dan SS1, dan puluhan butir peluru. Anggota tim juga menyita 16 buah bom lontar dan 1 golok sepanjang 30 cm. Tersangka juga merupakan anak buah Noordin M.Top.²⁴

Selain Noordin M.Top, Densus 88 juga berhasil menangkap Abu Dujana, teroris yang dianggap lebih berbahaya dibanding Noordin M Top, pada bulan Juni 2007.²⁵ Abu Dujana adalah komandan militer Jemaah Islamiyah, teroris di balik peledakan bom Bali I, hotel JW Marriott dan Kedubes Australia. Abu Dujana memiliki koneksi langsung dan dilatih oleh Osama bin Laden

Selanjutnya Densus 88 juga berhasil menangkap Amir (pemimpin) JI, yaitu Zarkasih. Zarkasih mengatur

dan mengontrol semua tindakan terorisme. Penangkapan kedua teroris tersebut disebut sebagai penangkapan terbesar oleh Densus 88.²⁶ Prestasi Densus 88 tersebut dianggap sebagai prestasi yang melambungkan nama Densus 88 Polri dan dapat dibuktikan bahwa Indonesia memiliki kesatuan anti teror yang handal dan profesional. Densus 88 berhasil menembak mati Noordin M Top dalam penyeragaman di rumah di Jebres, Solo, Jawa Tengah, 17 September 2009. Prestasi Densus 88 dalam aksi kontra terorisme tidak diragukan lagi, para teroris yang paling dicari se-Asia Tenggara maupun dunia berhasil ditemukan dan dieksekusi.

Program CTFP menghususkan diri melalui Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui *non lethal*, pendidikan dan pelatihan *Combating Terrorism* (CbT). Program ini berfokuskan untuk memberikan pendidikan, serta pelatihan kontra terorisme langsung kepada petugas militer tingkat pertengahan/senior internasional, kementerian pertahanan sipil, dan pejabat keamanan.²⁷

CTFP dalam kerjasamanya dengan TNI berhadapan dengan Komando Pasifik AS atau USPACOM (*United States Pacific Command*). Keduanya sering melakukan berbagai pelatihan seperti *Comprehensive Security Responses to Terrorism, Military and Peacekeeping Operations, Boarding Officer Course, Military Intelligence Captains Career Course, International*

²³ Muradi, *Densus 88 AT: Konflik, Teror, dan Politik*. (Bandung: Dian Cipta. 2012), hal 40

²⁴ "Dr Azahari Ledakkan Diri" *Suara Merdeka*, 2005. Diakses dari <http://www.suaramerdeka.com/harian/0511/10/nas01.htm>

²⁵ "Peristiwa yang Melambungkan Nama Densus 88", *Tempo*, 2013. Diakses dari <http://nasional.tempo.co/read/news/2013/03/09/078466041/peristiwa-yangmelambungkan-nama-densus-88>

²⁶ "Accused Asian terror leader: Expect more blood" *CNN*, 2007. Diakses dalam http://edition.cnn.com/2007/WORLD/asiapcf/06/25/abu.dujana/index.html?eref=rss_world

²⁷ Regional Defense Combating Terrorism Fellowship Program. (2008). Regional Defense Combating Terrorism Fellowship Program. Department of Defense

*Counterterrorism Fellows Program, Intelligence in Combating Terrorism, Special Operations and Combating Terrorism Course, Port Security/Vulnerability, CTFP Continuing Education Event Continuing Education, Event Civil-Military Responses to Terrorism, Special Operations Program - Curriculum 699.*²⁸ Oleh karena itu, tidak mengherankan jika TNI dalam penanganan terorisme di Indonesia memiliki kesatuan khusus anti terror seperti Unit 82 Den Gulrana, Den Jaka dan Den Bravo.

Meskipun demikian, sampai sekarang peran TNI terhadap penanganan aksi terorisme di Indonesia belum terlalu dilibatkan, masih banyak pro kontra terhadap keikutsertaan lembaga ini dalam aksi kontra terorisme seperti Densus 88 Anti Teror milik Polri. Selain adanya pro-kontra tersebut, adanya regulasi peraturan perundang undangan no. 15 Tahun 2003 yang mengatur bahwa tindak pidana terorisme yang berisikan wewenang-wenang Densus 88 dalam penanggulangan terorisme.²⁹

Kerjasama Indonesia dengan AS dalam program CTFP untuk TNI meskipun kurang mendapatkan peran nyata, namun memiliki keuntungan tersendiri. Keuntungan tersebut adalah TNI mendapatkan berbagai pelatihan dari salah satu negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia tentunya akan menambah dan memperkuat *skill* pertahanan keamanan demi menjaga NKRI. Lalu karena terorisme bukanlah suatu kejahatan yang mudah ditebak, maka TNI harus selalu siap dalam membantu menjaga keamanan negara dari serangan terorisme secara luas.

²⁸ Ibid

²⁹ Muradi. *Densus 88 AT: Konflik, Teror, dan Politik*. (Bandung: Dian Cipta, 2012) hal 21

Ancaman Terorisme di Indonesia-Amerika Serikat Tahun 2014-2018

Ancaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah usaha dilaksanakan secara konsepsional melalui tindakan politik atau kejahatan yang dapat membahayakan tatanan serta kepentingan nasional negara atau bangsa.³⁰ Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tindakan apapun yang sifatnya merugikan atau mengganggu kepentingan negara dan stabilitas politik adalah sebuah ancaman bagi sebuah negara, salah satunya adalah terorisme.

Terorisme tidak terlepas dari konstruksi sosial yang terjadi dalam dunia internasional. Salah satu pemicu perkembangan tersebut adalah terjadinya aksi teror di AS pada tahun 2001, dimana waktu itu gedung WTC dan Pantagon menjadi sasaran utama terorisme. dalang utama dari peristiwa tersebut adalah Usama Bin Ladin. Usama Bin Ladin atau Usamah bin Muhammad bin Awwad bin Ladin merupakan pencetus kelompok teroris yang bernama Al-Qaida.

Terbunuhnya Usama bin Laden pada 2 Mei 2011 yang dilakukan oleh Pasukan Navy SEAL dalam operasi *Neptune Spear* (tombak Neptunus) mengakibatkan kemunduran ekistensi sebagai kelompok tersebut tidak adanya figure yang pantas menggantikan Usama, namun demikian kelompok-kelompok afiliasinya tidak terlalu mengalami perubahan dan tetap saja meneruskan aktivitas terorisme mereka.

Pasca meninggalnya Usama bin Laden, banyak pihak yang beranggapan bahwa perang melawan terorisme akan

³⁰ KBBI

berakhir, namun hal ini terbantahkan akan munculnya kelompok terorisme internasional bernama ISIS (*Islamic State Iraq and Syria*) sekaligus yang menandakan bahwa perang terhadap terorisme belum berakhir, bahkan memasuki babak kedua.

Meninggalnya Usama bin Laden dan kemunculan ISIS seakan menegaskan bahwa perubahan moment era perang dunia melawan Al-Qaeda sudah berakhir dan digantikan dengan perang dunia melawan ISIS. Hal ini juga menunjukkan bahwa perang melawan terorisme merupakan perang yang tidak berujung, dan hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak manapun yang mengatakan bahwa 'perang sudah berakhir' bahkan dari pecetus *war on terror* itu sendiri (Amerika Serikat).

ISIS merupakan organisasi yang dari ke waktu ke waktu terus berkembang dan memperluas daerah kekuasaannya. Organisasi ini awalnya didirikan oleh Abu Musab al-Zarqawi pada tahun 1999 dengan nama awal *Jamaat Al-Tawhid wal-Jihad* (JTJW). Abu Musab al Zarqawi sendiri adalah seorang murid dari pimpinan al-Qaeda yaitu Osama Bin Laden.³¹

Perkembangan dari kelompok tersebut menjadi ancaman bukan saja dikawasan Timur Tengah tapi sudah merambat keseluruh dunia, baik itu, Eropa, Asia, kawasan Afrika, AS, dan tidak terkecuali Indonesia. Aktivasnya

yang sudah mengglobal dan membentuk kelompok-kelompoknya diseluruh dunia serta mengajak kelompok terorisme yang sudah ada sebelumnya untuk bergabung dalam kelompok ini. Hal ini dibuktikan dengan pembaitan dari Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansharut Tauhid dan kelompok-kelompok terorisme lainnya. Hal ini juga pada akhirnya mempengaruhi aktiviatas terorisme di Indonesia dan AS, meskipun tidak semua aktivitasnya dilakukan oleh kelompok afiliasi ISIS.

AS merupakan salah satu negara pertama yang memerangi ISIL, bahkan dari awal kemuculan kelompok terorisme tersebut yaitu terhitung dari terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2014. Strategi AS dalam menumpas ISIL secara umum masih mengikuti National Strategy to Combat Terrorism yang dirilis pada 2003, tetapi OIR memiliki sembilan poin strategi yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih maksimal. Strategi-strategi tersebut, selain sejalan dengan NSCT, juga berfokus pada pentingnya dukungan moral terhadap demokratisasi di Irak, memberikan pelatihan kemiliteran, dukungan yang bersifat kemanusiaan serta mencegah masuknya foreign fighters. Untuk memaksimalkan usaha kontraterorisme ISIL, pada tahun 2015 AS berfokus terhadap perebutan kembali Raqqa dan Ramadi yang membuahkan hasil berupa pembebasan Sinjar⁴, pembebasan Ramadi yang jatuh ke tangan ISIL pada Mei 2015, progres dalam penguncian daerah penghubung yang vital bagi ISIL sebelum pengambilan kembali Raqqa, serta serangan terhadap sumber minyak yang dikendalikan ISIL melalui *Operation Tidal Wave II*.

Secara umum, strategi kontraterorisme AS dapat dijabarkan menjadi empat langkah, yaitu defeat,

³¹ Sukawarsini Djelantik dan Taufan Herdansyah Akbar, "*Terorisme Internasional dan Fenomena ISIS di Indonesia*," (lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Katolik Parahyangan, 2016) hal 3. Diakses dalam http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/823/LPD_Sukawarsini%20Djelantik_Terorisme%20Internasional%20dan%20Fen-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y

deny, diminish dan defend dimana masing-masing dari langkah tersebut memiliki obyek dan sasaran yang berbeda-beda.

Amerika Serikat meningkatkan bantuan militer Amerika Serikat dalam membantu penanganan kontra terorisme di Indonesia dalam hal militer dengan melaksanakan program CTFP (*Combating Terrorism Fellowship Program*) pada RDCTFP (*Regional Defense Combating Terrorism Fellowship Program*) melalui DoD (*Department of Defense*) untuk TNI.

CTFP didirikan untuk membangun kemitraan dalam *war on terror* melalui pelatihan *non lethal*, pendidikan, dan pelatihan CbT (*Combating terrorism*).³² CTFP memberikan pendidikan dan pelatihan kontra terorisme langsung kepada petugas militer tingkat pertengahan/senior internasional, kementerian pertahanan sipil, dan pejabat keamanan. Lebih lanjut, penguatan kerjasama kontra terorisme dengan Amerika Serikat dapat membantu Indonesia untuk meningkatkan kapabilitas militernya. Hal ini nampak pada proses perkembangan penguatan kerjasama tersebut, Indonesia sering mendapat bantuan militer. Amerika Serikat meningkatkan bantuan militer ke Indonesia dengan menjalin secara intens pengawasan peningkatan militer di Indonesia.

Amerika Serikat meningkatkan bantuan militer

Pada 2014, Amerika Serikat melalui program MEF (*Minimum Essential Force*), memberikan hibah pesawat tempur F-16 dan F-16 C/D

³² Cesarani Rilistya, Implementasi Kerjasama Indonesia Dengan AS Dalam Penanganan Aksi Terorisme di Indonesia. *Journal Of International Relations*, 2016.

Fighting Falcon. sebanyak 24 unit yang akan diterima secara bertahap³³

Penyerahan 24 unit pesawat F-16 dan F-16 C/D Fighting Falcon ini merupakan bagian dan upaya pemenuhan alutsista sebagai respon guna menghadapi berbagai dimensi ancaman nyata maupun yang berpotensi mengancam stabilitas keamanan nasional Indonesia. Penempatan kedua jenis pesawat F-16 tersebut juga rencananya akan ditempatkan di Skuadron Udara 16 Lanud Pekanbaru sebanyak 16 Unit, dan 8 lagi ditempatkan di Skuadron Udara 3 Lanud Iswayudi. Selain F-16, pada 2016 Indonesia juga mendapatkan hibah helikopter Bell-412 dan pesawat C-130.³⁴ Selain itu, pada tahun 2018, Indonesia melalui Kemenhan mendapat hibah 14 *drone ScanEagle* dan dan peng-upgradan tiga unit Helikopter Bell 412 dari pemerintah Amerika Serikat guna memperkuat Alutsista TNI AL.³⁵

Moderinisasi dan peningkatan alutsista harus dilakukan, hal ini dikarenakan perlunya kesetaraan kekuatan militer di tengah kawasa regional, ditambah dengan banyaknya peralatan militer Indonesia yang sudah mulai rusak dan tua.

pemenuhan alutsista TNI belum sepenuhnya dapat memenuhi target capaian MEF. Meskipun demikian, dapat dilihat bahwa pemerintah menunjukkan arah yang jelas dalam pemenuhan kapabilitas alutsistanya. Dilain sisi tabel tersebut juga memperlihatkan gambaran bahwa

³³[https://tirto.id/latar-belakang-hibah-f-16-dari-amerika-untuk-indonesia-clcf\\$](https://tirto.id/latar-belakang-hibah-f-16-dari-amerika-untuk-indonesia-clcf$)
<https://www.kemenhan.go.id/2018/02/28/24-unit-pesawat-f-16-cd-resmi-perkua-alutsista-tni-au.html>

³⁴ Lukman Fahmi Djarwono, Pembangunan Industri Pertahanan: Menuju Pemenuhan Target MEF atau sekedar ARM Candy, *Jurnal Fisip Universitas Slamet Riyadi*, Juni 2017

³⁵Dialog IUSSD ke-16

sebelum adanya MEF, Kapabilitas militer Indonesia belum tidak memenuhi standart MEF yang mana hal ini bisa saja mengancam keamanan Indonesia baik secara domestik maupun luar negeri.

Amerika Serikat Meningkatkan Bantuan Pelatihan

Program pendidikan dan pelatihan militer antara Indonesia dan Amerika Serikat masuk kedalam IMET. IMET adalah pelatihan dengan program berbiaya rendah dan merupakan komponen sangat efektif dari Amerika Serikat terhadap negara-negara internasional khususnya Indonesia.

Tujuan dari program ini adalah untuk memajukan tujuan stabilitas regional melalui hubungan *military to military* yang efektif dan saling menguntungkan melalui peningkatan pemahaman tentang isu-isu keamanan dan sarana untuk mengatasinya dan meningkatkan kerjasama keamanan kedua negara termasuk dalam penanganan terorisme. Selain itu, tujuan IMET adalah untuk memberikan pelatihan yang akan menambah kemampuan pasukan militer negara peserta untuk mendukung operasi gabungan dan interoperabilitas dengan Amerika Serikat. Terakhir, pelatihan militer ditujukan untuk meningkatkan kemampuan personel militer dan sipil asing untuk menanamkan dan memelihara nilai-nilai demokrasi dan melindungi hak asasi manusia yang diakui secara internasional didalam pemerintahan.³⁶

Peningkatan pelatihan terjadi pada tahun 2014-2018 dengan dilaksanakannya latihan sebanyak 314 kali dengan peserta 251 orang. Selama kurun waktu tersebut, Amerika Serikat juga telah mengeluarkan biaya sebesar \$16,689,540 untuk program tersebut.

³⁶ Joint Military Training Report, diakses dari https://www.state.gov/wpcontent/uploads/2019/04/fmt_voll_16_17.pdf

Peningkatan pelatihan tersebut kemudian berpengaruh pada bertambahnya *expert Working Group* sebanyak lima di tahun 2010-2013 menjadi enam di tahun 2014-2017. Dampak peningkatan pelatihan ini nampak pada pelatihan penangkalan terorisme melalui program CTFP dari tahun 2014-2018.

Dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 2014-2018 jumlah peserta yang ikut dalam kegiatan bersama pada program CTFP yang dikhususkan untuk penangkalan terorisme cenderung meningkat dari tahun ketahun. Meskipun dikhususkan untuk penangkalan terorisme namun tidak menampik dipergunakan untuk kegiatan lain seperti pengamanan wilayah laut, pengawasan daerah perbatasan dan sebagainya.

Amerika Serikat Memberikan Peningkatan Dana

Secara umum pembiayaan militer luar negeri Amerika Serikat merupakan pembiayaan akuisisi artikel pertahanan Amerika Serikat, layanan, dan pelatihan melalui hibah.³⁷ pelatihan yang dibiayain oleh hibah ini mendukung kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan tujuan keamanan regional, meningkatkan hubungan kerjasama militer bilateral da memungkunan sekuu dan negara-negara mitra untuk meningkatkan kerjasama keamanan bersama. FMF diatur dalam anggaran Urusan Internasional; DOS (Departement Luar Negeri) yang mengatur dan mengella dana sekutu, dan DoD (Departement Pertahanan) berfungsi sebagai penerapan program.

Pendanaan FMF secara umum digunakan untuj membeli artikel pertahanan Amerika Serikat, baik itu

³⁷ Foreign Military Training Report 2018. Diakses dari https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/12/FMT_Voume-I-FY20182019.pdf

layanan maupun pelatihan. Pengeluaran FMF pada pendidikan dan pelatihan kerjasama keamanan kepada negara-negara pada tahun 2018 berjumlah lebih dari \$59, 9 juta.

Peningkatan bantuan dana Amerika Serikat ke Indonesia nampak pada hasil dialog IUSSD ke 13 Tahun 2015, yang mana Amerika Serikat menyampaikan bahwa program FMF yang sedang berlangsung adalah pendanaan kegiatan pemeliharaan Helikopter Bell 412 dan pesawat ercules C-130 serta pendidikan dan pelatihan militer.³⁸

Selama kurun waktu 2014-2018, pemerintah Amerika Serikat telah memberikan dana bantuan sebesar \$15.382,333. Hal ini selaras dengan jumlah peserta yang telah mengikuti program ini sebanyak 574 orang. Salah satu pelatihan yang diberikan adalah *American Language Course General English Training Only* yang dilaksanakan di Lackland AFB, TX, US. Selain itu, Pada tahun 2015, Amerika Serikat telah memberikan dana sebesar \$3,984,627 khusus untuk kegiatan di USPACOM (United States Pacific Command), dimana Indonesia menjadi salah satu negara mitra yang tergabung dalam USPACOM.

KESIMPULAN

Penguatan kerjasama kontra terorisme berdampak pada kapabilitas keamanan Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok terorisme baik secara nasional maupun internasional. Hal ini terlihat pada adanya berbagai peningkatan baik militer, pelatihan maupun bantuan dana.

Pengambilan keputusan Indonesia untuk mengajak Amerika Serikat untuk bekerjasama dalam penguatan kerjasama kontra terorisme tidak hanya berdasarkan pada kepentingan diri sendiri (*self-help*) tetapi lebih disebabkan oleh adanya identitas yang melekat pada Amerika Serikat sebagai aktor internasional. Indonesia menyadari bahwa Amerika Serikat merupakan negara strategis yang punya kekuatan lebih di dunia. Untuk itu, Indonesia berusaha menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat agar kepentingan Indonesia dapat didukung dengan berbagai bentuk kerjasama demi mencapai kepentingan nasional Indonesia.

Daftar Pustaka

BUKU

- Buzan, Barry. *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the PostCold War Era*. London: Harvester Wheatheaf, 1991.
- C.Elman. *Realism. Dalam: M. Griffiths (Ed.), International Relations Theory for the Twenty-First Century*. New York: Routledge, 2007.
- Raourke, Jhon T. *International Politics on The Wolrd Stage*. USA: University of Connecticut, 2011.
- Rees, Wyn. *Transatlantic Counter-Terrorism Cooperation: The New Imperative*. Oxon: Routledge, 2006.
- Suryadinata. *Politik Luar Negeri Indonesia Di Bawah Soekarno*. Jakarta: LP3ES, n.d.
- Wise, William M. *Indonesia's War on Terror 2005*. Washington: DC

³⁸ Laporan IUSSSD XIV di Washington DC. Kementerian Pertahanan RI. Direktorat Jendral Strategi Pertahanan Internasional.

United States– Indonesia Society,
2005.

Jurnal

Arif, Muhammad Qobidl ‘Ainul.
“Behind the Gun of Densus 88 :
Understanding U . S . Government
Behavior under Crisis Situation.”
*Journal of Integrative
International Relations* Vol.1, no.
No.1 (2015.): 15–26.
<http://digilib.uinsby.ac.id/14499/> .

Kedang, Ambrosius Yustinus.
“Internasionalisasi Dan
Internalisasi Wacana War on
Terror.” *Journal Sospol* Vol.3, no.
No.2 (Juli-Desember 2017.): 21–
42.
[https://ejournal.umm.ac.id/index.p
hp/sospol/article/view/4883/4972](https://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/4883/4972)

Kusuma, Ardli Johan. “Analisis
Perkembangan Norma
Internasional War on Terror”
Dalam Perspektif Realis, Liberalis
Dan Konstruktivis.” *Indonesian
Perspective* Vol.4, no. No.2
(Januari-Juni.): 1–19.
[https://ejournal.undip.ac.id/index.p
hp/ip/article/view/24477/15520](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/24477/15520)

Rilistya, Cesarani. “Implementasi
Kerjasama Indonesia Dengan As
Dalam Penanganan Aksi
Terorisme Di Indonesia.” *Journal
Hubungan Internasional* Vol.2, no.
No.1 (2016): 166–73.
[https://media.neliti.com/media/pub
lications/135069-ID-implementasi-
kerjasama-indonesia-dengan.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/135069-ID-implementasi-kerjasama-indonesia-dengan.pdf).

Wuryandari, Ganewati. “Politik Luar
Negeri Indonesia Dalam
Menghadapi Isu Terorisme
Internasional.” *Jurnal Penelitian
Politik* Vol.11, no. No. 2 (n.d.):

71–83.

[https://ejournal.politik.lipi.go.id/in
dex.php/jpp/article/view/202/86](https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/202/86).

Yuzardhi, Achmad, “Faktor-Faktor
Yang Melatarbelakangi Kerja
Sama Kontra-Terrorisme Indonesia-
Rusia Tahun 2016,” *Moestopo
Journal International Relations*,
Volume 1, No. 1, (Maret 2021),
hlm 15-30

Website

Jenkins, John Philip. “Terrorism.”
Britannica, n.d.
[https://www.britannica.com/topic/t
errorism](https://www.britannica.com/topic/terrorism).

KEMENLU. “Kerjasama Bilateral
Amerika Serikat-Indonesia.”
Kemenlu.go.id, n.d.
[www.kemlu.go.id/pages/IFPDispla
y.aspx?Name=BilateralCooperatio
n&IDP=37&P=Bilateral&l=id](http://www.kemlu.go.id/pages/IFPDisplay.aspx?Name=BilateralCooperation&IDP=37&P=Bilateral&l=id).

KIPS, Direktorat. “Indonesia Dan
Upaya Penanggulangan
Terorisme.” *Kementerian Luar
Negeri Republik Indonesia*, n.d.
[https://kemlu.go.id/portal/id/read/9
5/halaman_list_lainnya/indonesia-
dan-upaya-penanggulangan-
terorisme](https://kemlu.go.id/portal/id/read/95/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-upaya-penanggulangan-terorisme).

Staf, CNN Wire. “How U.S Forces
Killed Osama Bin Laden,,” *CNN*,
n.d.
[http://edition.cnn.com/2011/WOR
LD/asiapcf/05/02/bin.laden.raid/](http://edition.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/05/02/bin.laden.raid/).